



2025

LAPORAN

KINERJA

TRIWULAN I

Direktorat Pemberdayaan Usaha
Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2025.

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Sebagai landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2024 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2025 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang investasi dan keberlanjutan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha ke depan.

Jakarta, 3 April 2025

Direktur Pemberdayaan Usaha



Catur Sarwanto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh kebijakan yang ditempuh selama Tahun 2025 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2024. Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama periode triwulan I Tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan nilai investasi dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

Tujuan strategis di atas selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Usaha dan Investasi dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja.

Dari 11 indikator kinerja tersebut sebanyak 4 (empat) telah dilakukan pengukuran pada Triwulan I Tahun 2025, sedangkan indikator kinerja lainnya belum dapat diukur karena tidak ada target capaian pada triwulan I. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut ke-4 indikator kinerja telah mencapai target Triwulan I tahun 2025. Dengan capaian dimaksud, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2025 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaaku adalah sebesar 112,55%.

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut.

1. Dari 11 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 6 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 4 indikator kinerja bersifat triwulanan.
2. Sebanyak 6 indikator kinerja dimaksud yaitu (1) Persentase UMKM pengolahan produk KP yang meningkat omset, (2) Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan, (3) Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (4) Nilai minimal yang dipersyaratkan

untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (5) Nilai penilaian mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, (6) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha.

3. Sebanyak 1 indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP.
4. Sedangkan 4 indikator kinerja yang bersifat triwulanan yaitu (1) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan, (2) Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan, (3) Nilai Pembiayaan usaha KP melalui Kredit Program, (4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha.
5. Pencapaian realisasi indikator kinerja triwulan I atas 4 indikator yang bersifat triwulanan adalah (1) Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan diperkirakan mencapai Rp1,75 Triliun atau dengan kata lain tercapai 104,79% dari target Triwulan I (2) Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan, telah teralisasi 17 izin usaha atau dengan kata lain tercapai 170%; (3) Nilai Pembiayaan usaha KP melalui Kredit Program teralisasi sebesar Rp1,50 Triliun atau dengan kata lain tercapai 125%; dan (4) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha, tercapai 100% atau dengan kata lain tercapai 105,26% dari target triwulan I.

Pada Triwulan I Tahun 2025, anggaran Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah sebesar Rp12.619.500.000,-. Dari pagu anggaran awal tersebut, terdapat blokir sebesar Rp10.796.253.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp1.822.747,000,-. Penyerapan anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp81.018.286,- atau setara dengan 0,64% terhadap total pagu anggaran awal atau 4,44% terhadap pagu anggaran pasca blokir.

Pencapaian terhadap target sasaran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah dicapai selama triwulan I Tahun 2025, serta rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang dihadapi diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar target yang ditetapkan dapat tercapai. Hasil analisis yang komprehensif terhadap masing-masing Indikator Kinerja diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya, agar kinerja dapat dijalankan lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia.....	4
1.5. Permasalahan Utama	6
1.6. Sistematika Penyajian.....	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1. Capaian Kinerja	22
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	23
3.2.1. Sasaran Strategis 1	24
Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan	24
IK1. Nilai investasi kelautan dan perikanan.	24
IK2. Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Dan Pemasaran Yang Diterbitkan	31
3.2.2. Sasaran Strategis 2	35
Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan.....	35
IK3. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan Yang Meningkat Omsetnya.....	35
IK4. Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan Dan Perikanan	38
IK5. Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan Dan Perikanan Melalui Kredit Program43	

3.2.3 Sasaran Strategis 3	49
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan	49
IK6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha ...	49
IK7. Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	51
IK8. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha.....	51
IK9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	52
IK10. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha	53
IK11. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	53
BAB IV. PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Rekomendasi	57
4.3. Tindak Lanjut	57
Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan IV 2023, sebagai berikut:.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2025.....	21
Tabel 2 Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025.....	23
Tabel 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai investasi kelautan dan perikanan pada Triwulan I Tahun 2025	25
Tabel 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Dan Pemasaran Yang Diterbitkan Triwulan I Tahun 2025.....	32
Tabel 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya Triwulan I Tahun 2025.....	36
Tabel 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan Triwulan I 2025	39
Tabel 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program Triwulan I 2025	44
Tabel 8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025	50
Tabel 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025	51
Tabel 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025	53
Tabel 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang).....	4
Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan.....	5
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin	5
Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan	6
Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha	22
Gambar 3. 2 Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan I Tahun 2024-2025 (Rp Triliun).....	25
Gambar 3. 3 Koordinasi dan Sinergitas Pengembangan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan dengan BKPM	26
Gambar 3. 4 Promosi Peluang Investasi Pengolahan Tuna Kabupaten Biak Numfor ..	27
Gambar 3. 5 Koordinasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama Ditjen PDSPKP dengan ASPRINDO	28
Gambar 3. 6 Pendampingan Investasi PT. DPO Indonesia tanggal 13 Maret 2025	30
Gambar 3. 7 Surat Koordinasi Pendampingan Realisasi Minat Investasi	30
Gambar 3. 8 Pendampingan Investasi Rinjani Tunas Pratama Tanggal 25 Februari 2025	31
Gambar 3. 9 Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan	32
Gambar 3. 10 Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan.....	33
Gambar 3. 11 Sosialisasi Kebijakan Perizinan Berusaha Sektor KP	35
Gambar 3. 12 Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP	37
Gambar 3. 13 Inisiasi Kerjasama Koperasi dengan Unit Pengolahan Ikan pada tanggal 19 Februari 2025	40
Gambar 3. 14 Penguatan Kelembagaan Usaha Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara pada tanggal 6 Maret 2025	41
Gambar 3. 15 Inventarisasi Kebutuhan Lembaga Usaha serta Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan Usaha pada tanggal 13 Maret 2025	42
Gambar 3. 16 Penguatan kelembagaan pelaku usaha pengolahan ikan asin di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing-Kota Jakarta Utara pada tanggal 14 Maret 2025	43

Gambar 3. 17 Rapat Koordinasi Permohonan Data dan Kelompok46
Gambar 3. 18 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 31 Maret 202550

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nir-limbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kinerja Tahunan yang dibuat

sebelumnya, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP menyusun Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini secara terstruktur akan menginformasikan capaian kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu Triwulan I Tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Adapun Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian sasaran strategis pada Tahun 2025 kepada para *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

1.3. Tugas dan Fungsi

Sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi agar terwujud organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, dan adanya persetujuan tertulis dari Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan penataan kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 10 Februari 2025, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya penetapan tersebut, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Pasal 176 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Prasarana dan Sarana
- c. Direktorat Pemberdayaan Usaha;
- d. Direktorat Pengolahan;
- d. Direktorat Pemasaran; dan
- e. Direktorat Akses dan Promosi.

Selanjutnya dalam Pasal 187 Peraturan Menteri tersebut, Direktorat Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pemberdayaan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan, pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi, fasilitasi pengelolaan literasi keuangan,

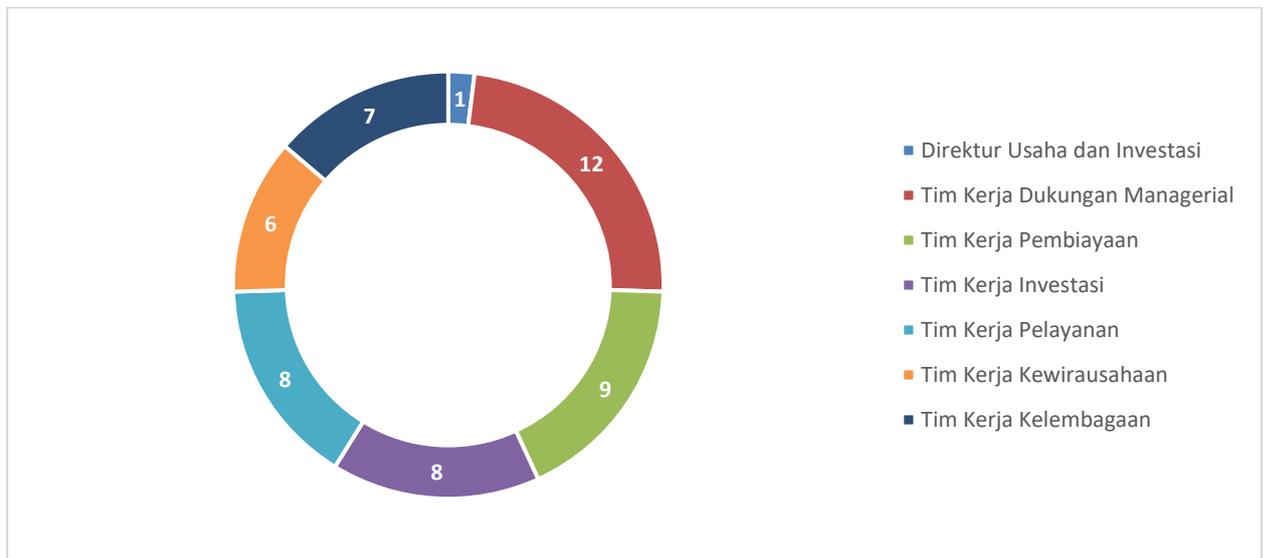
pendampingan kewirausahaan, fasilitasi pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha kelautan dan perikanan, serta perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan; dan

f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pemberdayaan Usaha.

1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia

Jumlah sumber daya manusia atau pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 berjumlah 51 orang, yang terdiri atas 35 orang Aparatur Sipil Negeri (ASN), 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 3 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan 5 orang Pegawai dengan status Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang tersebar di 6 Tim Kerja, dengan rincian sebagai berikut:

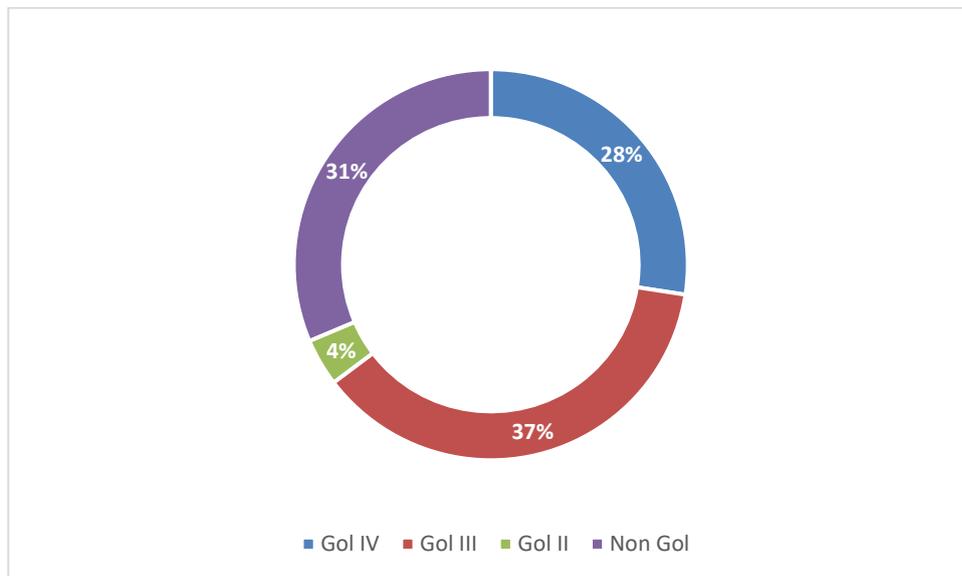
1. Jumlah pegawai berdasarkan unit kerja, meliputi Direktur sebanyak 1 orang, Tim Kerja Investasi sebanyak 8 orang; Tim Kerja Pelayanan dan Kemitraan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Pembiayaan sebanyak 9 orang; Tim Kerja Kewirausahaan 7; Tim Kerja Kelembagaan sebanyak 8 orang; dan Tim Kerja Dukungan Manajerial sebanyak 12 orang.



Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Unit Kerja (Orang)

2. Jumlah pegawai menurut golongan khusus ASN, meliputi golongan IV sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 19 orang, golongan II sebanyak 2 orang dan Non

Golongan sebanyak 16 orang. Menurut golongannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak pada golongan III, yakni 37%.



Gambar 1. 2 Proporsi Jumlah Pegawai (ASN) menurut Golongan

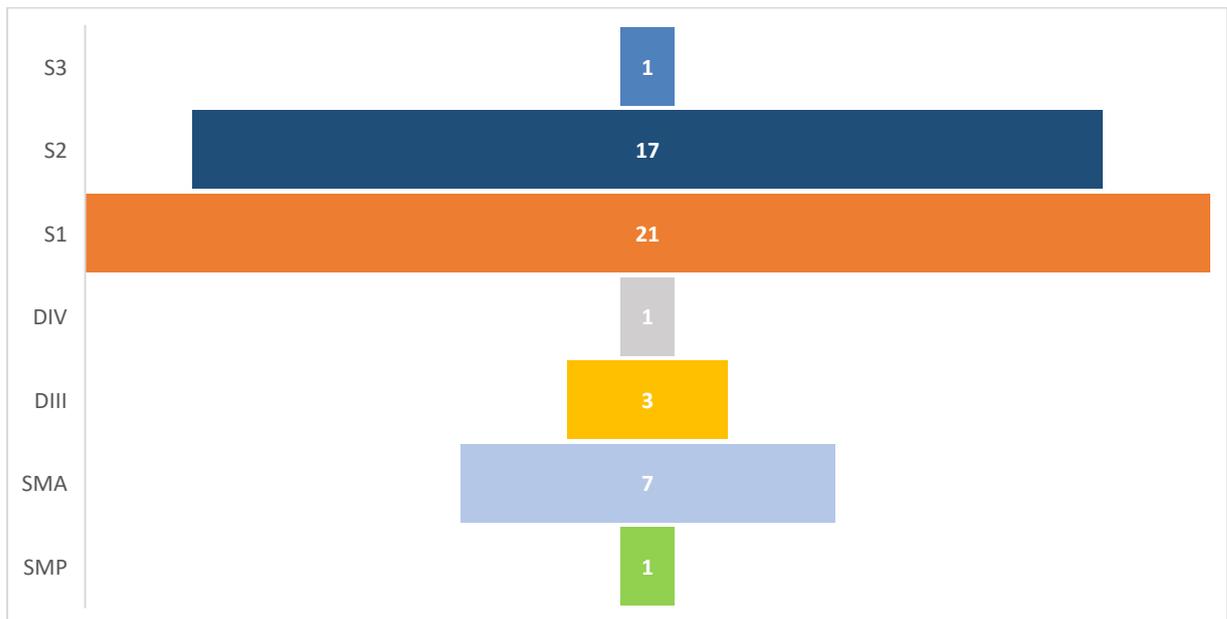
- Jumlah pegawai menurut jenis kelamin, meliputi laki-laki sebanyak 30 orang, atau 59% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha, dan perempuan sebanyak 21 orang, atau 41% dari total pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha.



Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin

- Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan, meliputi S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 17 orang, S1 sebanyak 21 orang, D4 sebanyak 1 orang, D3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 7 orang dan SMP sebanyak 1 orang. Menurut tingkat

pendidikannya, pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha terbanyak dengan tingkat pendidikan S1, yakni mencapai 41%.



Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai (ASN) menurut Pendidikan

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pembangunan hilirisasi industri melalui upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pengolahan, akses modal terbatas, rantai pasok belum efisien, kualitas SDM dan teknologi yang kurang memadai, rendahnya nilai tambah produk, akses pasar terbatas dan lemahnya branding, dan kebijakan dan kordinasi yang belum sinkron.

Dari sisi pemanfaatan potensi sumberdaya, berbagai upaya untuk peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan perlu terus dilakukan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Disisi lain, kemudahan dalam berusaha bagi pelaku usaha mikro-kecil dan usaha menengah-besar, dan akses terhadap sumberdaya (modal, teknologi, sarpras, tenaga kerja) juga perlu mendapatkan perhatian.

Dampak kondisi perekonomian nasional saat ini terhadap perkembangan sektor usaha kelautan dan perikanan sangat signifikan karena sektor ini sangat bergantung pada stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal, perdagangan, dan daya beli masyarakat, utamanya bagi pelaku usaha mikro kecil. Untuk itu diperlukan upaya dan strategi yang

mampu beradaptasi dengan kondisi yang terjadi saat ini, agar kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi dapat dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan investasi dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan diantaranya:

1. Penyediaan informasi peluang investasi usaha di sektor kelautan dan perikanan yang siap ditawarkan (*ready to offer*).
2. Pelayanan kemudahan berusaha di sektor kelautan dan perikanan.
3. Penguatan korporasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dalam kerangka *Major Project* Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.
4. Fasilitasi kemitraan dan kerja sama usaha dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
5. Fasilitasi akses pembiayaan dari lembaga keuangan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
6. Peningkatan literasi utamanya tentang manajemen usaha dan pengelolaan keuangan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah.

1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP selama Tahun 2025, termasuk didalamnya capaian kinerja pada Triwulan I 2025. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan I Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Triwulan I Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, menyajikan tujuan, sasaran, capaian kinerja;

2. **Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum tentang Direktorat Pemberdayaan Usaha, dengan penekanan kepada aspek strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha;
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025;
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Disamping itu, dalam Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk meningkatkan kinerjanya;
6. **Lampiran.**

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha menginduk pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) yang dituangkan dalam rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Renstra Ditjen PDSPKP) Tahun 2025-2029. Dokumen renstra merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif terkait pembangunan daya saing produk kelautan dan perikanan pada lima tahun mendatang.

2.1.1 Visi

Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada rancangan RPJPN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJPN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu

"Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan".

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) **transformasi ekonomi**, dan (b) **ketahanan sosial budaya dan ekologi**. Dukungan tersebut akan dikuatkan dengan strategi sebagai berikut : (a) Hilirisasi Penangkapan Ikan berbasis komoditas unggulan, (b) Meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha, (c) Peningkatan tata kelola dan kinerja sistem logistik ikan nasional termasuk pengembangan sistem telusur logistik ikan nasional, (d) Pengembangan industri

pengolahan dan pemasaran untuk mendukung hilirisasi dan peningkatan nilai tambah, (e) Meningkatkan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk kelautan dan perikanan, (f) Penguatan pasar dalam negeri melalui peningkatan akses kemudahan Masyarakat dan (g) Penguatan pasar luar negeri.

2.1.2 Misi

Misi Ditjen PDSPKP akan mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden (Bab 1) serta Misi KKP yang mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan misi Presiden dan wakil Presiden dalam rancangan RPJMN tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan 7 dari 8 Misi/Asta Cita yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **“Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 8**, Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
2. **“Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 2**, Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan **Misi Asta Cita 6**, Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
3. **“Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 3**, Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan **Misi Asta Cita 5**, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri

- berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
4. **“Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 4**, Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas; dan
 5. **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas”** yang menjabarkan **Misi Asta Cita 7**, Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Dari lima misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung tiga misi, yaitu:

- (a) Meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung swasembada pangan yang merata di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan,
- (b) Meningkatkan nilai tambah, hilirisasi dan penjaminan kualitas Produk Kelautan dan Perikanan, dan
- (c) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berkualitas

2.1.3 Tujuan

Guna mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk tahun 2025-2029. Mengacu rancangan Renstra KKP tahun 2025-2029, ada lima tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, yaitu:

- a. Meningkatnya kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta terwujudnya wilayah pesisir dan laut yang adaptif terhadap perubahan iklim dan bencana;
- b. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang didukung dengan pengawasan yang tangguh dan efektif;
- c. Meningkatnya daya saing dan mutu hasil produk kelautan dan perikanan;
- d. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan; dan
- e. Birokrasi yang efektif dan efisien yang berorientasi pada kualitas pelayanan publik

Dari lima tujuan tersebut, yang menjadi tujuan dari pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah “**meningkatkan mutu dan daya saing hasil produk kelautan dan perikanan**”. Tujuan pembangunan tersebut akan dicapai melalui program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selama tahun 2025-2029.

2.1.4 Sasaran

Sasaran strategis (SS) pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) sebagai *outcome/impact* dari program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tahun 2025-2029. Sebagai organisasi di bawah KKP, sasaran strategis Ditjen PDSPKP melekat pada sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu:

- SS-1 Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi, Serta Terwujudnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Laut
- SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan Perikanan
- SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
- SS-4 Meningkatnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
- SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas.

Dari lima sasaran strategis tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mendukung secara langsung dua sasaran strategis, yaitu: **SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan**, dan **SS-5 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas**.

2.1.5 Kebijakan

Dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional pada Bagian A dan kebijakan KKP pada Bagian B, maka perlu disusun beberapa target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029. Penyusunan target capaian ini juga memperhatikan agenda penguatan transformasi yang didukung KKP, sasaran strategis KKP yang didukung Ditjen PDSPKP, serta tujuan pembangunan PDSPKP tahun 2025-2029 yang disampaikan pada Bab 2. Terkait agenda penguatan

transformasi yang didukung KKP, Ditjen PDSPKP mendukung agenda transformasi ekonomi dan agenda ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Pada agenda **transformasi ekonomi**, yang didukung oleh Ditjen PDSPKP adalah:

- ❖ IE 4: Iptek inovasi dan produktivitas ekonomi, yaitu untuk agenda yang berkaitan dengan:
 - Pengembangan UMKM kelautan dan perikanan tembus pasar global
 - Kemudahan akses pembiayaan
- ❖ IE 7: Integritas ekonomi domestik global, yaitu untuk agenda yang berkaitan dengan:
 - Peningkatan investasi asing serta integrasi produk KP pada skema GPN
 - Penguatan sistem logistik ikan nasional
 - Penyediaan sarana dan prasarana pendukung hilirisasi
 - Transformasi digital pemasaran produk dan jasa ekosistem kelautan dan perikanan

Selanjutnya pada agenda **ketahanan sosial budaya dan ekologi**, yang didukung oleh Ditjen PDSPKP adalah:

- ❖ IE 16: Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan
 - Penyediaan sistem rantai dingin yang merata
 - Pengembangan pangan akuatik (*blue foods*)
 - Penanganan *stunting* melalui kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)

Dengan memperhatikan semua arahan tersebut, maka target capaian pada pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 yang kemudian menjadi arah kebijakan Ditjen PDSPKP pada tahun 2025-2029, dinyatakan:

“Kebijakan PDSPKP : Mewujudkan produk kelautan dan perikanan Indonesia yang berdaya saing di pasar domestik dan ekspor”

Kebijakan dan strategi tersebut nantinya akan diimplementasikan melalui beberapa program dan kegiatan yang berbasis ekonomi biru, sehingga mendukung

pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Program dan kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 tersebut adalah:

a. **Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.**

- ❖ Kegiatan PDSDKP-1: Prasarana dan Sarana hasil kelautan dan perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-2: Investasi dan Keberlanjutan Usaha Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-3: Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-4: Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- ❖ Kegiatan PDSDKP-5: Akses dan Promosi Kelautan dan Perikanan

b. **Program Dukungan Manajemen.** Program ini dilakukan melalui kegiatan pembangunan penguatan daya saing produk KP tahun 2025-2029, yaitu:

- ❖ Kegiatan PDSDKP-6: Dukungan Manajemen Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Adapun strategi pelaksanaan untuk kebijakan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Direktorat Pemberdayaan Usaha adalah:

1. Pemetaan dan analisis pemberdayaan usaha dan investasi

Mengidentifikasi dan menganalisa potensi dan peluang **usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan** sehingga potensi dan peluang tersebut dapat dipetakan dan siap ditawarkan kepada para calon pelaku usaha atau investor.

Langkah operasional yang perlu diupayakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- 1) Identifikasi potensi pemberdayaan usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan hasil perikanan pada suatu kawasan atau wilayah
- 2) Analisa potensi usaha dan investasi menjadi satu peluang usaha dan investasi komoditas unggulan pada suatu kawasan atau wilayah yang siap ditawarkan kepada calon pelaku usaha atau investor
- 3) Pemetaan peluang usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan hasil perikanan

2. fasilitasi literasi keuangan dan Akses Pembiayaan Usaha Kelautan Dan Perikanan

1) Literasi Keuangan

Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- Identifikasi tingkat literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Analisa intervensi yang dibutuhkan untuk masing-masing tingkatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- Penyusunan bahan dan materi sosialisasi dan edukasi sesuai dengan tingkatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Sosialisasi dan edukasi bahan dan materi literasi keuangan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan
- Penyelenggaraan bimbingan teknis literasi keuangan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Pendampingan literasi keuangan kepada pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan literasi keuangan pelaku usaha kelautan dan perikanan

3. Akses Pembiayaan

Kegiatan fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha bertujuan untuk mendukung pertumbuhan sektor usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan pelaku usaha dapat mengakses sumber pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan, serta menjalin kemitraan yang menguntungkan untuk memperluas skala bisnis mereka. Dengan kemudahan akses pembiayaan dan kemitraan, diharapkan usaha kecil dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Selanjutnya, langkah-langkah untuk peningkatan akses melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro, dan dana bergulir adalah:

- Identifikasi calon debitur potensial berbasis kelas UMKM dan/atau data KUSUKA
- Fasilitasi akses pembiayaan usaha kelautan dan perikanan;
- Pembinaan klaster pembiayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- Pembentukan Pokja Kredit Program melibatkan lembaga penyalur kredit program
- Sinergi mendukung program prioritas KKP dalam hal fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha sektor kelautan dan perikanan
- Penyusunan juknis penyaluran KUR sektor kelautan dan perikanan
- Penyusunan laporan kebutuhan pembiayaan usaha
- Evaluasi kebutuhan pembiayaan oleh Tim Pokja Kredit Program
- Penetapan kelayakan pembiayaan dan jenis kredit yang diberikan
- Pendampingan akses pembiayaan oleh tenaga pendamping atau penyuluh perikanan
- Fasilitasi penyaluran kredit melalui lembaga penyalur kredit program Pemerintah
- Analisis dampak pelaku usaha penerima kredit program;

4. **Fasilitasi Pendampingan Kewirausahaan dan Pembentukan Wirausaha Baru Bidang Pengolahan dan Pemasaran**

Kegiatan ditujukan untuk: (a) menumbuhkan jiwa dan motivasi berwirausaha, (b) menciptakan wirausaha baru produk KP yang inovatif dan kreatif, (c) meningkatkan kapasitas wirausaha yang akan naik kelas, (d) membentuk wirausaha berkarakter kuat dan handal, dan (e) Penguatan kapasitas usaha menuju wirausaha mapan dan calon wirausaha ekspor.

Sasaran **penumbuhan usaha** baru adalah siswa/purna siswa sekolah menengah atas/kejuruan, mahasiswa/alumni perguruan tinggi dan masyarakat umum. Sedangkan **sasaran pendampingan** wirausaha adalah pelaku usaha/wirausaha yang membutuhkan pendampingan usaha. **Langkah-langkah** yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan wirausaha kelautan dan perikanan adalah:

1. Sosialisasi kewirausahaan untuk memberikan informasi dan gambaran tentang wirausaha dan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam berwirausaha.
2. Analisis kebutuhan untuk menggali informasi terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh calon wirausaha dalam membangun sebuah usaha
3. Seleksi calon wirausaha yang benar-benar berminat dan tidak beralih ke pekerjaan lain
4. Pelatihan peningkatan kapasitas calon wirausaha/wirausaha yang akan naik kelas.

5. Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Usaha dan Kemitraan Usaha

1. Kelembagaan Usaha

Fasilitasi pengembangan kelembagaan menjadi titik awal untuk membangun ekosistem usaha dalam mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha yang berdaya saing. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku usaha agar mampu meningkatkan efisiensi biaya dan meningkatkan posisi tawar sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Sasaran pengembangan kelembagaan usaha adalah pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan. Target dari kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha adalah transformasi kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.

Langkah operasional yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan kelembagaan usaha meliputi :

- 1) Penyadartahuan pelaku usaha terhadap status lembaga usaha berbadan hukum
- 2) Fasilitasi pembentukan lembaga usaha berbadan hukum
- 3) Identifikasi pelaku usaha yang berpotensi ditingkatkan kapasitas kelembagaan usahanya
- 4) Perumusan model kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang sesuai di kawasan pengembangan

- 5) Penguatan kelembagaan usaha melalui serangkaian kegiatan pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis
- 6) Pengembangan kelembagaan usaha berbasis korporasi
- 7) Pembentukan dan pembinaan lembaga inkubator bisnis
- 8) Pengembangan usaha di dalam dan luar kawasan usaha
- 9) Monitoring dan evaluasi kinerja lembaga usaha

2. Kemitraan

Fasilitasi ditujukan untuk mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi dengan membentuk jaringan kerjasama antara koperasi, UMKM dan usaha besar, usaha hulu dan usaha hilir dengan tujuan yang sama untuk menjalankan suatu bisnis dan mencari keuntungan.

Langkah operasional pelaksanaan fasilitasi kemitraan meliputi :

1. Identifikasi kebutuhan kemitraan
2. Fasilitasi dan pendampingan usaha perikanan sektor hulu (tangkap dan budidaya) untuk bermitra dengan usaha hilir (pengolahan dan pemasaran hasil perikanan)
3. Fasilitasi kerjasama usaha mikro kecil dan koperasi yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan dengan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4. Fasilitasi kerjasama UMKM hasil kelautan dan perikanan dengan BUMN dalam rangka mengakses Program Kemitraan BUMN
5. Fasilitasi dan pendampingan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk bermitra dengan distributor dan jaringan pemasaran digital.

6. Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan Serta Pendampingan Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan

Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sistem perizinan berusaha saat ini dilaksanakan berbasis risiko, *post audit* dan terintegrasi dalam *Online Single Submission* (OSS). Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Pemberdayaan Usaha

mendapatkan mandat melaksanakan fasilitasi pelayanan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen untuk setiap pelaku usaha dengan status PMA.

Tujuan utama fasilitasi pelayanan perijinan berusaha adalah memberikan keterbukaan akses informasi kepada pelaku usaha perihal persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu perijinan serta melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, dengan harapan pelaku usaha mendapatkan pelayanan yang terbaik dan merasakan manfaat atas pelayanan perijinan yang diberikan. Alur perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran ikan adalah:

1. Mendaftar melalui situs <http://oss.go.id> untuk mendapatkan akses dengan membuat akun nama pengguna dan kata sandi
2. Memasukkan bidang usaha, nilai investasi serta kelengkapan data pendukung maka sistem akan menerbitkan NIB
3. Sistem OSS RBA akan memverifikasi pengajuan pada tahapan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak
4. Jika mengambil KBLI dengan tingkat risiko menengah rendah izin usahanya terbit otomatis, sedangkan KBLI dengan tingkat berisiko menengah tinggi wajib memiliki NIB dan sertifikat standar
5. Sertifikat standar yang telah terverifikasi merupakan izin usaha dan bisa digunakan untuk mengurus PB untuk menunjang kegiatan usaha (UMKU) untuk operasional dan komersial
6. Kewajiban pelaku usaha setelah perizinan berusaha terbit:
 - Memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Skala usaha mikro dan kecil paling lama 2 (dua) tahun dan Skala usaha menengah dan besar paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan
 - Membuat laporan kegiatan usaha pengolahan ikan setiap 6 (enam) bulan kepada Penerbit Sertifikat Standar.

Pendampingan investasi dilakukan untuk menindaklanjuti rencana investasi dalam dokumen usulan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen. Selain itu, pendampingan investasi juga dilaksanakan

dalam rangka menindaklanjuti hasil promosi peluang investasi kelautan dan perikanan yang berupa minat investasi pada sektor kelautan dan perikanan, baik dari PMA maupun PMDN. Upaya yang dilakukan untuk melakukan fasilitasi pelayanan perizinan berusaha sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen, serta pendampingan investasi adalah:

1. Penyiapan bahan kebijakan pelayanan perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelayanan publik dalam rangka penguatan budaya layanan prima
3. Pendampingan perijinan berusaha, verifikasi dokumen rencana kegiatan usaha dan penerbitan perizinan berusaha
4. Sosialisasi kebijakan perizinan berusaha
5. Pelaksanaan pelayanan perizinan pengolahan ikan, pemasaran ikan, dan jasa pasca panen penangkapan ikan
6. Pendampingan pelaporan kegiatan usaha
7. Verifikasi calon investor yang minat investasi dan/atau memiliki rencana investasi di sektor kelautan dan perikanan
8. Pendampingan calon investor dalam rangka penyelesaian hambatan investasi, fasilitasi perolehan insentif fiskal dan non-fiskal, serta percepatan realisasi investasi
9. Analisis dan pemantauan capaian realisasi usaha dan investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
10. Sosialisasi dan edukasi tata cara melakukan usaha dan investasi bidang kelautan dan perikanan di Indonesia.
11. Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam rangka pengukuran kinerja pelayanan perizinan pengolahan ikan dan pemasaran ikan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan sasaran strategis yang akan dicapai dan pengukuran tingkat keberhasilan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja (*performance plan*) 2024. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja dengan target kinerja. Perjanjian Kinerja pada Triwulan I mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru

tentang penetapan indikator kinerja pada setiap level. Perjanjian Kinerja yang telah disahkan sebagaimana disajikan pada Lampiran 1.

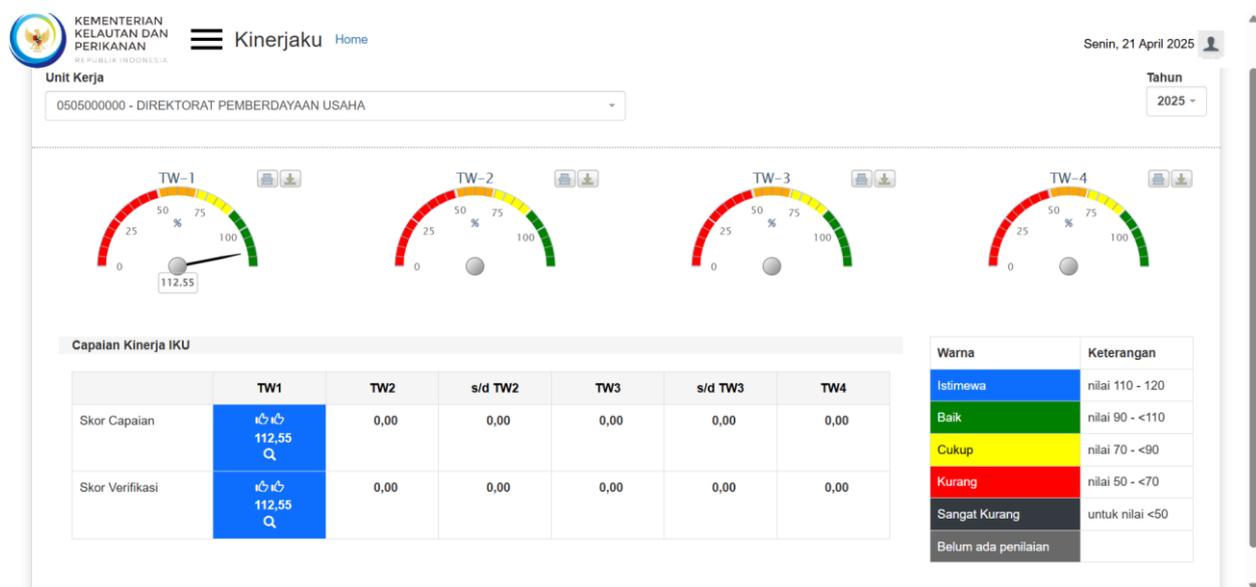
Tabel 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan	1.	Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	7,24
		2.	Jumlah perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran yang diterbitkan (sertifikat)	50
2.	Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan	3.	Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya (Persen)	5
		4.	Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan (Persen)	6
		5.	Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	7,99
3.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95
		7.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100
		8.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86
		10.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87
		11.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja seluruh level lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025 pada SAPK dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 1 Dashboard Nilai NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025 sebesar 112,55% dengan predikat Istimewa.

Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Tahun 2025 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis.

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan I Tahun 2025, terdiri atas 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja.

Tabel 2 Capaian Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja 105,26 (IK)	Target		Realisasi			
		2025	TW I	TW I	Sd TW I	% thd Target TW I	% sd thd Target 2025
1	Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	7,24	1,67	1,75	1,75	104,79	24,17
2	Jumlah perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran yang diterbitkan (sertifikat)	50	10	17	17	170	34
3	Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya (Persen)	5	-	-	-	-	-
4	Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan (Persen)	6	-	-	-	-	-
5	Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	7,99	1,20	1,59	1,59	132,5	19,89
6	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95	95	100	100	105,26	105,26
7	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100	-	-	-	-	-
8	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pemeliharaan predikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75	-	-	-	-	-
9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86	-	-	-	-	-
10	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87	-	-	-	-	-
11	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1	-	-	-	-	-

3.2.1. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya investasi kelautan dan perikanan

IK1. Nilai investasi kelautan dan perikanan.

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain: penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP, diantaranya yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi komoditas unggulan, dan Penangkapan Ikan Terukur, serta mendukung peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Realisasi investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing terhadap pembangunan kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur sebagai upaya penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan.

Tabel 3 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai investasi kelautan dan perikanan pada Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Nilai investasi kelautan dan perikanan (Rp. Triliun)	1,67	-	-	7,24	1,75*	-	-	1,75*	104,79	-	-	24,17

Ket : * Angka Prognosa

Realisasi investasi KP pada triwulan I tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp1,75 triliun, yakni tercapai 104,79% jika dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 sebesar Rp1,67 triliun, atau mencapai 24,17% jika dibandingkan dengan target tahun 2025 yakni Rp7,24 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu triwulan 1 tahun 2024 sebesar Rp1,59 triliun maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 10,07%.



Ket: *) angka prognosa

Sumber : BKPM/Kementerian Investasi, diolah Ditjen PDS

Gambar 3. 2 Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan I Tahun 2024-2025 (Rp Triliun)

Realisasi investasi pada triwulan I tahun 2025 yang diperkirakan mencapai Rp1,75 triliun yang terdiri dari PMA sebesar Rp0,38 Triliun dan PMDN sebesar Rp1,36 Triliun. PMA diperkirakan mengalami sedikit perlambatan 0,26% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp0,39 Triliun, sedangkan PMDN diperkirakan meningkat sebesar 13,31% dari periode yang sama tahun sebelumnya triwulan I tahun 2024 sebesar Rp1,20 Triliun.

Direktorat Pemberdayaan Usaha telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.000.000.000,-. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp4.490.695.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp509.305.000,-. Penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp29.169.445,- atau setara dengan 0,58% terhadap total pagu anggaran awal atau 5,73% terhadap pagu anggaran pasca blokir (pagu efektif).

Kegiatan dalam rangka mencapai investasi usaha kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Prasarana Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan. Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan merupakan kawasan pemusatan dan pengelolaan perusahaan kelautan dan perikanan yang terintegrasi secara sistem bisnis perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran dalam rangka

Hilirisasi hasil kelautan dan perikanan. Pada triwulan I Direktorat Pemberdayaan telah menyusun rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Rancangan peraturan tersebut telah dilakukan harmonisasi dengan Kemenkumham dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait (draft rancangan peraturan terlampir). Menindaklanjuti dari harmonisasi dimaksud, Ditjen PDSPKP telah melakukan koordinasi dan sinergi kegiatan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi (BKPM) pada tanggal 21 Januari 2025 di Ruang Rapat Pemberdayaan Usaha. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Hilirisasi Kelautan dan Perikanan – BKPM, Sekretaris Ditjen PDSPKP, Direktur Logistik, Direktur Pengolahan, dan pegawai lingkup Ditjen PDSPKP. Agenda pada rapat dimaksud yaitu pembahasan konsep dan rencana program hilirisasi kelautan dan perikanan serta sinergitas kegiatan hilirisasi.



Gambar 3. 3 Koordinasi dan Sinergitas Pengembangan Kawasan Hilirisasi Kelautan dan Perikanan dengan BKPM

2. Promosi Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi kelautan dan perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode triwulan I antara lain :

a. Promosi peluang investasi pengolahan tuna di Kabupaten Biak Numfor melalui media sosial. Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu daerah penghasil tuna di Indonesia bagian Timur adalah Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Wilayah ini menjadi pintu strategis menuju Samudera Pasifik yang memiliki potensi tuna yang berlimpah. Potensi tersebut tentunya menjadi peluang untuk berinvestasi pada industri pengolahan tuna yang terintegrasi dengan usaha penangkapan sehingga menghasilkan ikan yang bermutu dan bernilai tambah tinggi, serta mampu menembus pasar global.



Gambar 3. 4 Promosi Peluang Investasi Pengolahan Tuna Kabupaten Biak Numfor

b. Pendampingan Minat Investasi

1) Pendampingan Minat Investasi ASPRINDO

ASPRINDO merupakan gabungan pengusaha pribumi Indonesia, dengan perwakilan yang tersebar di 34 wilayah di Indonesia. ASPRINDO berencana mengembangkan Kampung Industri perikanan di Kabupaten Paser - Provinsi Kalimantan Timur. Kampung Industri merupakan sebuah kawasan yang dibangun dalam kerangka penguatan ekosistem usaha berbasis produk unggulan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pengelolaan Kampung Industri akan dilakukan melalui kerjasama antara mayoritas penduduk kawasan sebagai industri skala mikro dan pengusaha menengah yang bertindak sebagai industri

inti, dengan prinsip saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri tersebut. Konsep Kampung Industri ASTRINDO adalah memiliki satu *fish mini market* ASPRINDO yang dikelola melalui koperasi. Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan ASPRINDO untuk membahas konsep kampung industri sektor Kelautan dan Perikanan, *grand design* proyek percontohan kampung industri udang windu dan bandeng di Paser, Kalimantan Timur dan Pembahasan Kerja Sama. Pada tanggal 6 Maret 2025 telah dilakukan Penandatanganan Kerja Sama antara Ditjen PDSPKP dengan ASPRINDO dengan ruang lingkup (1) pengembangan sarana dan prasarana (2) fasilitasi akses pasar dan promosi hasil perikanan (3) pemberdayaan usaha dan investasi (4) pendampingan dan pembinaan pengolahan hasil perikanan dan (5) berbagi pakai data dan informasi.



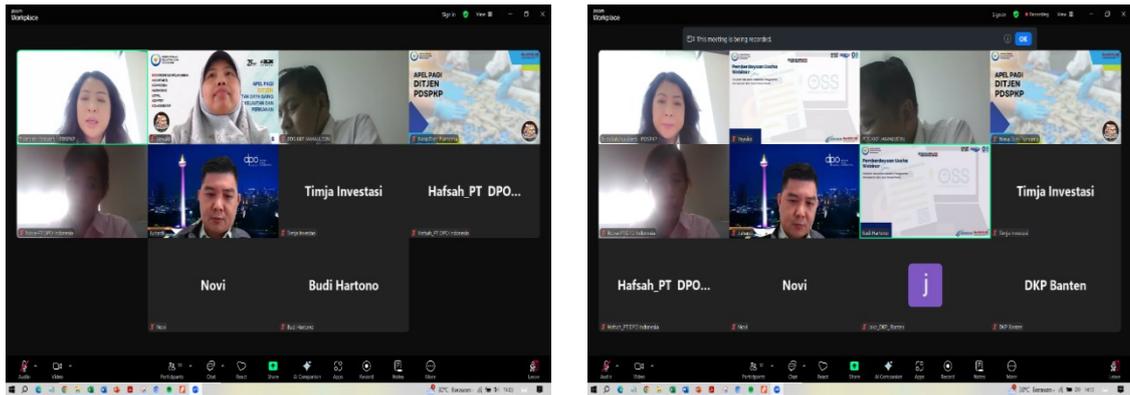
Gambar 3. 5 Koordinasi dan penandatanganan perjanjian kerja sama Ditjen PDSPKP dengan ASPRINDO

2) Pendampingan dan Audiensi Minat Investasi PT. Red Chamber
PT. Red Chamber merupakan Perusahaan makanan laut dari Amerika yang berencana melakukan pengembangan usaha budidaya tilapia dan pengolahan fillet di Indonesia. Rapat koordinasi dilaksanakan secara daring pada tanggal 13 Maret 2025, dipimpin oleh Direktur Promosi Wilayah Amerika dan Eropa – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dihadiri oleh Direktur Pemberdayaan Usaha, Pejabat Promosi Investasi IIPC New York, serta perwakilan Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Ikan Air Tawar, dan Eselon II lingkup Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Red Chamber didampingi tim dari BKPM, IIPC New York, dan HIPMI, telah melakukan survei ke Kabupaten Subang – Jawa

Barat pada bulan September 2024. Dari hasil kunjungan tersebut, Red Chamber menyimpulkan bahwa kurang berminat untuk berinvestasi di Subang karena dinilai memiliki *story* dan *history* usaha tilapia yang kurang kuat, kebersihan lingkungan sekitar lokasi usaha kurang terjaga, kapasitas produksi relatif rendah, serta keberlanjutan usahanya kurang terjamin. Di samping itu, Red Chamber juga telah melakukan survei ke Malaysia sebagai pembanding dalam lokasi tujuan investasi komoditas tilapia. Tindak lanjut dari rapat dimaksud antara lain (1) IIPC New York akan berkoordinasi dengan Red Chamber untuk memperjelas minat investasi di Indonesia terkait tahapan investasi, besaran potensi nilai investasi, serta jenis tilapia yang diminati. (2) Ditjen PDSPKP bersama dengan Ditjen Perikanan Budi Daya akan berkoodinasi lebih lanjut dengan UPI dan pembudidaya tilapia yang akan diusulkan untuk dimitrakan dengan Red Chamber. (3) Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa akan memfasilitasi rapat lanjutan setelah ada usulan calon mitra investor dari KKP.

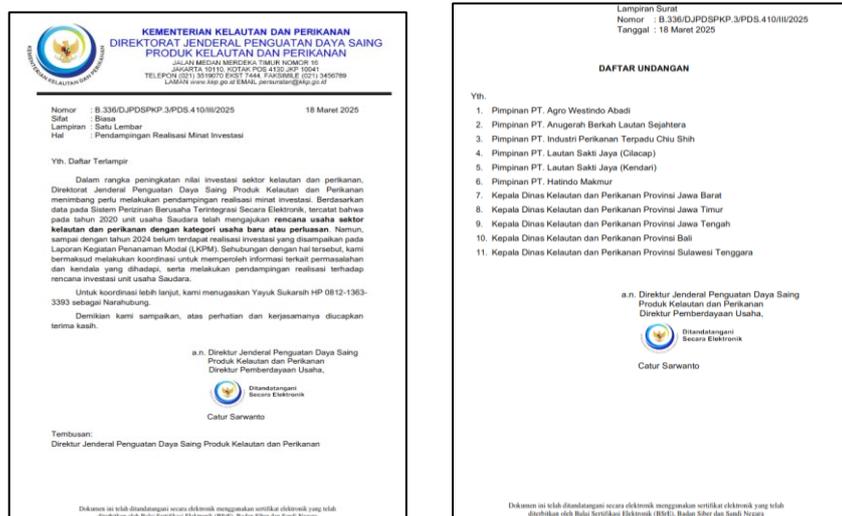
3) Pendampingan Investasi PT. DPO Indonesia

Koordinasi dengan PT. DPO Indonesia dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 secara online. Berdasarkan data pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pada tahun 2020 PT. DPO Indonesia berlokasi di Tangerang Banten tercatat telah mengajukan rencana usaha sektor kelautan dan perikanan dengan kategori usaha baru atau perluasan. Namun, sampai dengan tahun 2024 belum terdapat realisasi investasi yang disampaikan pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Berdasarkan hasil koordinasi PT. DPO Indonesia menyampaikan bahwa saat ini telah beroperasi namun terdapat perubahan data rencana usaha sehingga perlu proses verifikasi dokumen rencana usaha. Terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) PT. DPO Indonesia akan melakukan pelaporan realisasi investasi KBLI 10298 (industri pengolahan rumput laut) dan 46026 (perdagangan besar hasil perikanan) pada LKPM periode April 2025.



Gambar 3. 6 Pendampingan Investasi PT. DPO Indonesia tanggal 13 Maret 2025

Selain itu Direktorat Pemberdayaan usaha juga melaksanakan koordinasi pendampingan realisasi terhadap rencana usaha dengan PT. Agro Westindo Abadi, PT. Anugerah Berkah Lautan Sejahtera, PT. Industri Perikanan Terpadu Chiu Shih, PT. Lautan Sakti Jaya (Cilacap), PT. Lautan Sakti Jaya (Kendari), PT. Hatindo Makmur serta Dinas Kelautan dan Provinsi terkait melalui surat Nomor B.336/DJPDSPKP.3/PDS.410/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Pendampingan Realisasi Minat Investasi.



Gambar 3. 7 Surat Koordinasi Pendampingan Realisasi Minat Investasi

4) Pendampingan Minat Investasi PT Rinjani Tunas Pratama
 PT Rinjani Tunas Pratama adalah calon investor yang memiliki rencana investasi sektor kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir, yaitu usaha penangkapan hingga pengolahan ikan, dengan estimasi nilai investasi mencapai US\$ 65 juta. Rencana bisnis tersebut berlokasi di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara

standar pelayanan, penyelesaian hambatan perizinan, pengelolaan pengaduan dan survey kepuasan masyarakat.

Dalam rangka mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, sebagai indikator kinerja Layanan Perizinan Usaha Pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Capaian kinerja ini belum dapat dihitung pada Triwulan I, hal ini dikarenakan penilaian terhadap layanan perizinan usaha pengolahan bagi pelaku usaha KP baru dapat dilakukan pada akhir tahun.

Tabel 4 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan Dan Pemasaran Yang Diterbitkan Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Jumlah perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran yang diterbitkan (sertifikat)	10	-	-	50	17	-	-	17	170	-	-	34

Realisasi penerbitan sertifikat pada triwulan I tahun 2025 mencapai 17 sertifikat, yakni tercapai 170 % jika dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 sebesar 10 sertifikat, Jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya yaitu triwulan 1 tahun 2024 sebesar 11 sertifikat maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 64 %.

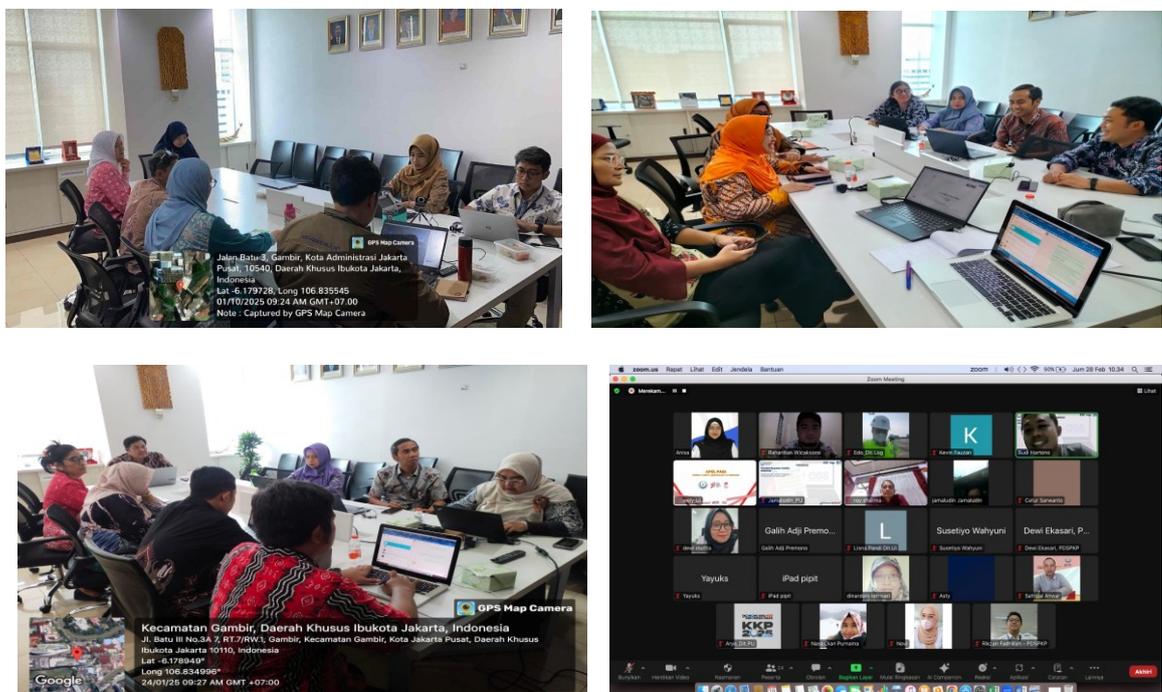


Gambar 3. 9 Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan

Kegiatan Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan dan Pemasaran bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025, meliputi:

1. Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan.

Kegiatan verifikasi kelengkapan standar berusaha pengolahan dan pemasaran selama periode triwulan I 2025, telah dilaksanakan 7 (tujuh) rapat verifikasi. Pertemuan ini bertujuan dalam rangka membahas kelengkapan komitmen, rencana usaha dan permohonan penerbitan standar usaha. Pertemuan dihadiri oleh tim verifikasi yang beranggotakan: Pusat Data, Statistik, dan Informasi - Setjen, Bagian Hukum - Setditjen PDSPKP, Direktorat Pengolahan, Direktorat Logistik, Direktorat Pemasaran, BBP3KP, serta Koordinator kelompok lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP. Adapun Selama periode Januari - Maret 2025 telah diterbitkan 17 sertifikat pengolahan dan pemasaran kepada 14 pelaku usaha yang bermohon dengan rincian 6 (enam) sertifikat berusaha bidang pengolahan dan 8 (delapan) sertifikat berusaha bidang pemasaran yang sesuai dengan ketentuan Permen KP No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan, dimana pelaku usaha tersebut harus memenuhi standar usaha yang telah ditetapkan.



Gambar 3. 10 Implementasi pelayanan perizinan berusaha sektor kelautan dan perikanan

2. Sosialisasi Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan, Pemasaran dan Jasa Pasca Panen

Dalam rangka meningkatkan pemahaman kepada pelaku usaha terkait Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan, Pemasaran dan Jasa Pasca Panen, telah dilaksanakan webinar pada Kamis, 20 Februari 2025. Dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Usaha. Webinar diikuti oleh 700 peserta (500 di zoom dan 200 di youtube) yang berasal dari perwakilan pimpinan unit pengolahan dan penanganan ikan seluruh Indonesia, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia, JFT Penata Perizinan lingkup Ditjen PDSPKP, Petugas PTSA KKP serta perwakilan eselon 2 lingkup Ditjen PDSPKP.

Adapun materi yang disampaikan adalah terkait

- Implementasi perizinan berusaha berbasis resiko sektor kelautan dan perikanan oleh Direktur Hilirisasi Perkebunan dan Kehutanan - BKPM RI
- Penerapan pengawasan dan sanksi administrasi bagi pelanggaran ketentuan perizinan berusaha serta implementasi laporan kegiatan usaha oleh Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan - Ditjen PSDKP
- Pelayanan perizinan berusaha subsektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha - Ditjen PDSPKP

Beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain sulitnya menarik/mengunduh data pelaku usaha dari aplikasi OSS untuk dikonversikan menjadi file excel, pelaku usaha dengan resiko usaha menengah tinggi agar melengkapi dokumen persyaratan berupa rencana kegiatan usaha dan pada Tahun 2024, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan a.n. Menteri KP juga telah berhasil menerbitkan 46 sertifikat standar melalui sistem OSS-RBA dengan total rencana investasi besar Rp. 921 Milyar. Untuk pelayanan penerbitan PBUMKU (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) agar dipercepat prosesnya, sehingga pelaku usaha yang sudah mengurus PBUMKU tidak terkena teguran oleh APH. Perbaikan percepatan pelayanan pada kontak servis OSS, sehingga mempermudah konsultasi bagi pengguna jasa. Hal legalitas perizinan usaha pun tidak fokus hanya sebatas kepatuhan, tapi juga membuka banyak kemudahan dan peluang usaha untuk bertumbuh. NIB dan sertifikat standar yang diterbitkan dengan aplikasi OSS versi 1.1 agar dilakukan pendaftaran/migrasi ke OSS versi

RBA. KBLI jasa pasca panen yang diampu oleh Ditjen PDSPKP adalah 03133 (jasa pasca panen penangkapan ikan di laut) dan 03134 (jasa pasca panen penangkapan ikan di perairan darat). Perubahan izin lokasi juga terjadi di wilayah pemekaran daerah di Provinsi Papua. Kegiatan usaha harus dilaporkan sebagai upaya pemerintah dalam melakukan monitoring terhadap beberapa kesalahan dan permasalahan dalam perizinan berusaha serta sebagai bahan pembinaan Tindak lanjut dari rapat dimaksud antara lain diperlukan dukungan dari OSS untuk mengkonversi data dari aplikasi ke file excel, kebutuhan konversi data ke file excel untuk memudahkan dalam menghitung jumlah pelaku usaha yang terbit. Fasilitas rapat dengan ATR/BPN untuk penyelesaian perubahan lokasi karena pemekaran di Provinsi Papua Barat. Sosialisasi berkelanjutan, agar pelaku usaha selalu mendapatkan update terkait tata cara dan persyaratan perizinan berusaha. Peningkatan pendampingan kepada pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usaha secara berkala.



Gambar 3. 11 Sosialisasi Kebijakan Perizinan Berusaha Sektor KP

3.2.2. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya omset UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan

IK3. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan Yang Meningkatkan Omsetnya

Potensi UMKM kelautan dan perikanan masih sangat terbuka luas untuk dikembangkan. Namun upaya pengembangan UMKM kerap dihadapkan pada berbagai permasalahan salah satunya adalah aspek finansial dalam hal ini peningkatan omset. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM kelautan dan perikanan

diperlukan strategi pemberdayaan yang berpihak kepada UMKM dan menjadi solusi dalam berbagai permasalahan yang dihadapi dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan omsetnya.

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya dalam rangka mendorong tumbuhnya UMKM untuk meningkatkan omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan. Pada Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 5%

$$\Sigma n \% = (\Sigma n1 / \Sigma n2) \times 100\%$$

$\Sigma n \% =$ Persentase peningkatan omset UMKM Pengolahan Produk KP

$\Sigma n1 =$ Jumlah UMKM yang meningkat omsetnya

$\Sigma n2 =$ Jumlah UMKM yang dibina

UMKM yang meningkat omsetnya dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5 Ikhtisar Pencapaian Indikator Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Persentase UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan yang meningkat omsetnya (Persen)	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-

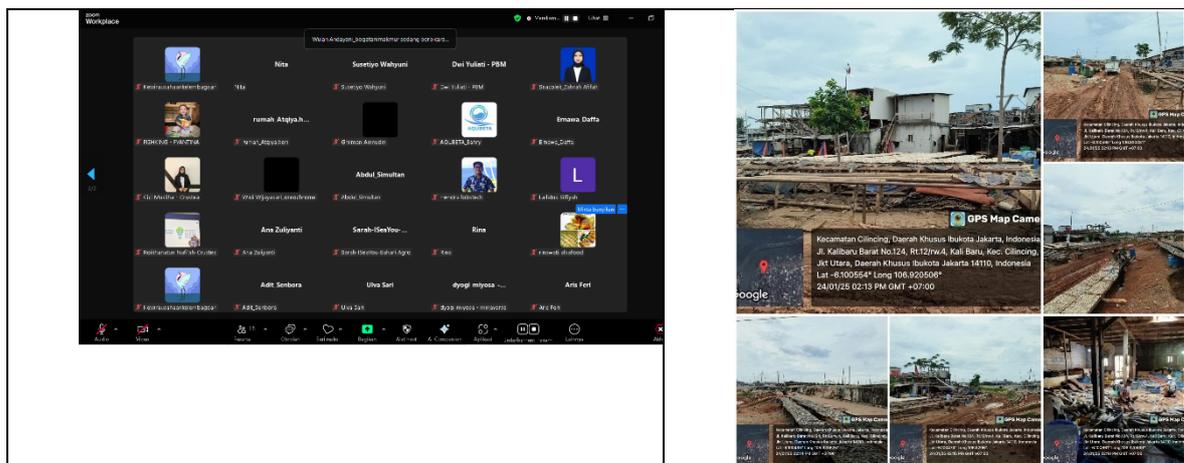
Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya merupakan persentase jumlah UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang meningkat omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan menuju UMKM Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM yang dibina. Indikator Kinerja ini dilaporkan secara tahunan, sehingga pada triwulan I nilai Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya belum dapat dihitung capaian realisasinya.

Untuk mendukung capaian tersebut, kegiatan penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan pada triwulan I 2025, meliputi:

A. Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha KP

Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025 dan 17 Maret 2025. Kegiatan tersebut mengundang Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kota Jakarta Utara, UMKM pengolah hasil perikanan di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, UMKM pengolah hasil perikanan dan kelautan yang menjadi target UMKM Naik Kelas serta Dinas Kelautan dan Perikanan daerah.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui proses bisnis UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan sehingga dapat ditentukan aspek yang akan dibina untuk meningkatkan omsetnya. Pada triwulan I tahun 2025 output dari kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha hasil KP sebanyak 55 UMKM.



Gambar 3. 12 Kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp17.393.000,- atau setara dengan 1,69% dari total pagu sebesar Rp1.031.156.000,-. Penggunaan anggaran pada triwulan I ini lebih difokuskan pada kegiatan rapat koordinasi dengan instansi terkait dan kegiatan identifikasi.

IK4. Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan Dan Perikanan

Fasilitasi pengembangan kelembagaan merupakan titik awal untuk membangun ekosistem usaha dalam mendorong pengembangan dan keberlanjutan usaha yang berdaya saing. Upaya yang dilakukan yaitu dengan memperkuat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pelaku usaha agar mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya dan meningkatkan posisi tawar sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan pelaku usaha. Sasaran pengembangan kelembagaan usaha adalah pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil kelautan dan perikanan. Target dari kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan usaha adalah transformasi kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025 fasilitasi pengembangan kelembagaan dilakukan melalui: penyadartahuan pelaku usaha terhadap status lembaga usaha berbadan hukum, fasilitasi pembentukan lembaga usaha berbadan hukum, identifikasi pelaku usaha yang berpotensi ditingkatkan kapasitas kelembagaan usahanya, perumusan model kelembagaan usaha hasil kelautan dan perikanan yang sesuai di kawasan pengembangan, penguatan kelembagaan usaha melalui serangkaian kegiatan pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan kelembagaan usaha berbasis korporasi, **fasilitasi perluasan akses pasar** dan kemitraan dengan pelaku usaha/lembaga usaha lain serta monitoring dan evaluasi kinerja lembaga usaha untuk dapat diketahui peningkatan kinerjanya. Untuk mengetahui peningkatan kinerja lembaga usaha, telah dilakukan evaluasi kinerja awal melalui pendataan kepada unit koperasi terpilih yang kemudian akan dibanding dengan hasil evaluasi kinerja di akhir tahun.

Kegiatan fasilitasi pengembangan kelembagaan tahun 2025 merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk mendukung penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan dengan target capaian ditetapkan sebanyak 22 lembaga dan target capaian peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan sebesar 6% yang akan disampaikan pada akhir tahun anggaran. Jumlah fasilitasi pengembangan kelembagaan yang telah dilakukan pada triwulan I tahun 2025 telah mencapai 2 lembaga usaha, dengan total capaian keseluruhan sejak triwulan I adalah 2 lembaga usaha yaitu telah mencapai 100%.

Tabel 6 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan Triwulan I 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Persentase peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan (Persen)												

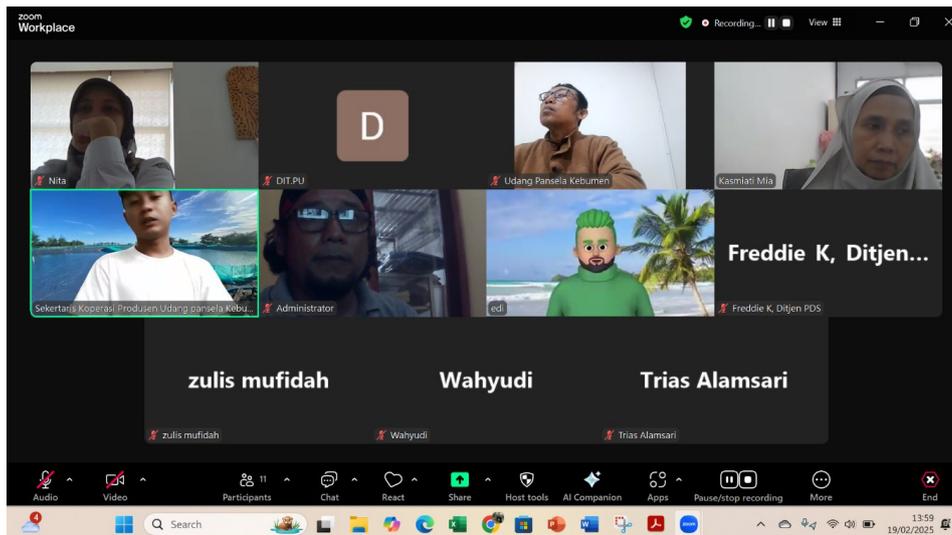
Pada triwulan I, telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1) Inisiasi Kerjasama Koperasi dengan Unit Pengolahan Ikan pada tanggal 19 Februari 2025

Pada tanggal 19 Februari 2025, Direktorat Pemberdayaan Usaha melaksanakan kegiatan inisiasi kerja sama antara koperasi binaan, yaitu Koperasi Produsen Udang Pansela Kebumen dan Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara, dengan PT. Graha Makmur Cipta Pratama selaku pelaku usaha pengolahan dan ekspor. Kegiatan ini bertujuan menjajaki peluang kemitraan untuk memperkuat akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan koperasi.

Koperasi Produsen Udang Pansela memiliki kapasitas produksi 120–150 ton/bulan dan menyewa UPI untuk pengupasan serta pembekuan udang. Kendala utama adalah fluktuasi harga dan belum adanya kontrak kerja sama dengan UPI. Sementara itu, Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara telah memiliki miniplant dengan kapasitas 100 kg bahan baku/hari, namun membutuhkan akses ke pasar yang lebih luas dan harga yang lebih kompetitif.

PT. Graha Makmur Cipta Pratama menyatakan kesiapan untuk menjalin kerja sama melalui perjanjian kontrak dengan spesifikasi bahan baku yang disepakati. Divisi udang memiliki empat unit pengolahan di berbagai daerah dengan sistem pembayaran 30 hari, sedangkan divisi rajungan menyediakan armada penjemputan dan pembayaran maksimal satu minggu. Kedua pihak sepakat melakukan kunjungan lapangan guna melihat proses budidaya dan pengolahan secara langsung sebagai langkah awal kerja sama.

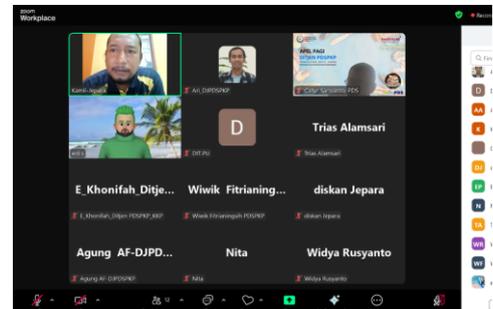


Gambar 3. 13 Inisiasi Kerjasama Koperasi dengan Unit Pengolahan Ikan pada tanggal 19 Februari 2025

2) Penguatan Kelembagaan Usaha Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara pada tanggal 6 Maret 2025

Pada tanggal 6 Maret 2025 telah dilaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan usaha Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan koperasi serta bentuk intervensi yang diperlukan guna meningkatkan kapasitas produksi dan kinerja kelembagaan. Saat ini, koperasi memproduksi sekitar 30 kg daging rajungan per hari dari 100 kg bahan baku, dengan kapasitas maksimum mencapai 350 kg bahan baku per hari. Produksi menurun akibat musim baratan yang menyebabkan nelayan tidak melaut dan terjadi persaingan harga dengan pengepul lain. Koperasi merencanakan penambahan lima orang picker dan memerlukan tambahan modal sekitar Rp100 juta untuk pembelian bahan baku pada musim panen, karena sistem pembayaran dari UPI membutuhkan waktu 2–3 hari. Terkait rencana kerja sama dengan PT. Graha Makmur Cipta Pratama, koperasi telah menjalin komunikasi dan menerima penawaran harga yang lebih tinggi dibandingkan mitra sebelumnya (PT. Guna Citra Kartika), namun terkendala biaya transportasi ke titik pengambilan di Rembang, sehingga koperasi masih melanjutkan kerja sama dengan mitra lama. Dari sisi kelembagaan, koperasi memperoleh dukungan CSR dari Bank Indonesia berupa bangunan dan peralatan pengolahan limbah karapas rajungan yang saat ini menunggu proses serah terima. Limbah tersebut akan diolah menjadi tepung sebagai campuran pakan ternak, dan koperasi telah menjalin komunikasi dengan calon pembeli produk tersebut.

Miniplant yang dikelola koperasi telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dengan grade B, dan untuk menjaga penerapan GMP, Direktorat Pengolahan akan memberikan pendampingan mutu. Sementara bangunan pengolahan limbah belum selesai, penanganan karapas dilakukan dengan pengeringan dan penutupan plastik untuk meminimalkan bau. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi terhadap tenaga kerja setelah penempatan picker profesional dan disiapkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas picker lokal. Dalam jangka pendek, koperasi memerlukan fasilitasi akses pembiayaan untuk operasional, terutama pembelian bahan baku dan penambahan tenaga kerja guna mendorong peningkatan produksi.



Gambar 3. 14 Penguatan Kelembagaan Usaha Koperasi Produsen Berkah Rajungan Nusantara pada tanggal 6 Maret 2025

3) Inventarisasi Kebutuhan Lembaga Usaha serta Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan Usaha pada tanggal 13 Maret 2025

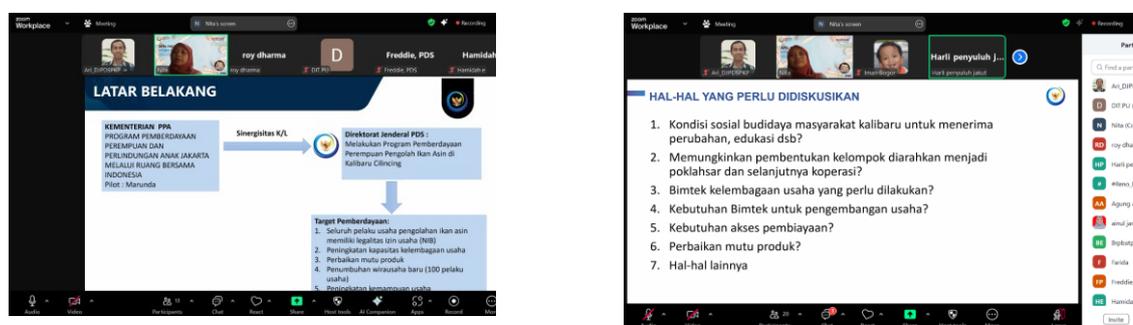
Pada tanggal 13 Maret 2025 telah dilaksanakan kegiatan inventarisasi kebutuhan lembaga usaha serta monitoring dan evaluasi keberlanjutan usaha sebagai bagian dari upaya pengembangan kelembagaan. Berikut adalah hasil dari inventarisasi kebutuhan lembaga usaha:

- Koperasi Produsen Putra Mina Laut memiliki 20 anggota aktif dengan fokus pada produksi dan pemasaran teri krispi dan abon ikan, namun menghadapi kendala keberlanjutan bahan baku dan belum melaksanakan RAT dalam dua tahun terakhir.
- Koperasi Umami Jaya Sejahtera Banyuwangi yang memproduksi berbagai olahan perikanan dengan total produksi 700 kg/bulan, menghadapi permasalahan modal, distribusi, dan gudang penyimpanan.

menjadi tantangan utama karena pelaku usaha umumnya merupakan pendatang dan menempati lahan milik PUPR dan Pelindo.

Pelaku usaha memiliki karakter sosial yang membutuhkan pendekatan khusus dan cenderung menerima program apabila memiliki dampak ekonomi langsung. Saat ini, sedang diproses pembentukan KUB/poklhasar dengan anggota awal 10 orang di RT 12, yang ke depannya diharapkan dapat berkembang menjadi koperasi. Upaya serupa sebelumnya pernah dilakukan melalui koperasi nelayan, namun belum berhasil menjalankan prinsip koperasi secara optimal.

Kegiatan yang mengharuskan kehadiran bersama pelaku usaha menghadapi kendala waktu karena bersamaan dengan jadwal produksi. Dalam hal akses pembiayaan, minat cukup tinggi namun terbentur pada persoalan jaminan dan BI checking akibat kepemilikan aset yang tidak sah dan riwayat kredit di daerah asal. Hingga kini, baru dua pengolah ikan asin berskala besar yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), yaitu Bapak Herman dan Bapak Sodikin, karena diwajibkan oleh mitra UPI. Untuk meningkatkan pemahaman dan keberhasilan fasilitasi pembiayaan, disarankan agar KUB/poklhasar Kalibaru difasilitasi bertemu dengan pelaku usaha dari daerah lain yang telah berhasil mengakses kredit usaha.



Gambar 3. 16 Penguatan kelembagaan pelaku usaha pengolahan ikan asin di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing-Kota Jakarta Utara pada tanggal 14 Maret 2025

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp4.400.000,- atau setara dengan 3,57% dari total pagu sebesar Rp123.346.000,- .

IK5. Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan Dan Perikanan Melalui Kredit Program

Direktorat Jenderal PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP untuk mendukung keberlanjutan usaha, dengan melakukan

fasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui pendampingan dalam mengakses kredit program yang berasal dari berbagai sumber pembiayaan, serta pengelolaan keuangan sederhana.

Nilai realisasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan adalah nilai realisasi pembiayaan yang berasal dari 2 jenis data penyaluran kredit, yaitu:

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Data realisasi KUR dimonitor secara berkala melalui Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan yang diolah lebih lanjut untuk mendapatkan nilai pembiayaan KUR sektor kelautan dan perikanan, baik subsektor hulu maupun hilir.

b. Kredit Ultra Mikro (Kredit UMi)

Data realisasi Kredit Ultra Mikro (UMi) diperoleh secara berkala dari PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai lembaga non bank yang menyalurkan kredit kepada pelaku usaha ultra mikro di sektor kelautan dan perikanan melalui program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera).

Direktorat Pemberdayaan usaha menargetkan nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada tahun 2025 sebesar Rp 7,99 Triliun. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat pemberdayaan usaha terus berupaya mendorong peningkatan realisasi Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program, antara lain: Pembentukan POKJA Kredit Program Kelautan dan Perikanan, Koordinasi dan sinergi secara berkala dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan dan sosialisasi, pembinaan dan sosialisasi dan literasi keuangan.

Tabel 7 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program Triwulan I 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Nilai pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	1,20	10,26	1,7	7,99	1,59	7,77	1,6	1,59	132	15,49	93,53	19,90

Realisasi Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada Triwulan I sebesar Rp. 1,59 Triliun kepada 71.865 Debitur yang terdiri atas Rp. 1,34 Triliun kepada 27.375 Debitur bersumber dari KUR usaha KP dan Rp. 0,25 Triliun kepada 44.490 Debitur bersumber dari Kredit UMi.

Capaian nilai pembiayaan sebesar Rp. 1,59 Triliun jika dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar Rp. 1,2 Triliun maka tercapai sebesar 132% atau setara dengan 19,90% dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar Rp. 7,99 Triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 maka capaian nilai pembiayaan pada Triwulan I tahun 2025 hampir setara yaitu sebesar 99,37%.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I untuk mendukung capaian tersebut antara lain:

1) Rapat Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan mendukung program prioritas Kampung Nelayan Modern dan Kampung Perikanan Budidaya

Dalam rangka penguatan UMKM sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan pembiayaan kredit program serta mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Nelayan Modern (Kalamo) dan Kampung Perikanan Budidaya (KPB), telah diselenggarakan rapat koordinasi fasilitasi akses pembiayaan Kredit Program berbasis kawasan yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 16 Januari 2025 dengan hasil sebagai Berikut :

- Program Kalamo telah berjalan sejak tahun 2023 di Biak dan Lampung, dan pada tahun 2025 direncanakan di 2 lokasi yaitu Warloka Manggarai Barat (usaha es batu dan jasa transportasi); dan Banyuwangi (usaha TPI, UPI, es batu, Logistik dan simpan pinjam)
- Program Korporasi Budidaya Rumput laut akan tetap dilanjutkan di tahun 2025 untuk lokasi Wakatobi (Sultra), Rote Ndao (NTT) dan Maluku Tenggara (Maluku). Selain lokasi tersebut, terdapat 2 program baru, yaitu technical cooperation dengan FAO di NTB terkait kajian kelayakan lokasi dan kemitraannya untuk komoditas rumput laut, dan program lautra di 7 lokasi Indonesia Timur, dengan prioritas pengembangan di Saburai Jua.
- Bank Himbara (Bank Mandiri dan Bank BNI) sangat tertarik untuk bisa memfasilitasi pembiayaan dan menyalurkan KUR kepada ekosistem bisnis perikanan untuk mendukung program KKP secara umum, konsep Program

Pembiayaan berbasis kawasan tidak hanya memfasilitasi pembiayaan tapi juga membentuk ekosistemnya

2) Rapat Fasilitasi Akses Pembiayaan Berbasis Kawasan.

Dalam rangka penguatan UMKM sektor kelautan dan perikanan melalui Fasilitasi pembiayaan kredit program untuk mendukung program prioritas KKP maka telah diadakan rapat koordinasi Fasilitasi Akses Pembiayaan bagi ekosistem bisnis perikanan. yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025 dengan hasil sebagai berikut:

- Potensi bandeng terbesar di Indonesia adalah di Tarakan Kalimantan Utara, Pangkep Sulawesi Selatan, dan Gresik Jawa Timur. Ikan bandeng dari luar pulau jawa memiliki karakteristik dan peluang pasar yang berbeda, ikan bandeng dari Tarakan memiliki bentuk yang lebih ramping dan panjang dan memiliki pangsa pasar di Timur Tengah. Sedangkan untuk ikan bandeng dari pulau jawa bentuknya lebih pendek, dagingnya lebih banyak dan ukurannya lebih merata, ikan bandeng ini di ekspor untuk pasar premium di Korea Selatan dan Jepang.
- Potensi Lokasi yang ditawarkan oleh AP5I untuk komoditas udang adalah Kalimantan & Makasar. Di Kalimantan terdapat UPI Kalimantan fisheries dan di Sulawesi Selatan UPI Sam Surya Mandiri. Kedua UPI ini sudah punya tambak sendiri dan memiliki pembudidaya binaan yang cukup banyak. Permasalahan pada hubungan petambak dengan pembinanya sejauh mana tidak dapat dipantau.
- Usaha yang dapat dibiayai di sektor usaha patin adalah Pembenihan, Pembesaran dan usaha pengolahan. Untuk penghasil benih ikan patin ada di dramaga, bogor, parung dan bekasi. Pembesaran dan pengolahan ada di Tulungagung, Trenggalek, Riau, Palembang dan Lampung. APCI melakukan Pembinaan dari hulu ke hilir. Selain patin juga ada komoditas ikan lele.



Gambar 3. 17 Rapat Koordinasi Permohonan Data dan Kelompok

3) Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan mendukung Program Prioritas KKP

Dalam rangka penguatan UMKM sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan pembiayaan kredit program untuk mendukung program prioritas KKP berbasis kawasan produksi sektor kelautan dan perikanan dan mendukung program UMKM naik kelas telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan usaha melalui kredit program kepada penerima bantuan pemerintah berupa gudang penyimpanan berpendingin. Kegiatan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 6 februari 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom dengan hasil sebagai Berikut :

- Kegiatan Fasilitasi pembiayaan dibuka oleh Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan dihadiri oleh Setditjen PDSPKP, Dit Plogistik ditjen PDSPKP, Dit Pemasaran ditjen PDSPKP, itjen KKP, BPSDMKP, 43 pelaku usaha penerima bantuan pemerintah gudang penyimpanan berpendingin tahun 2020-2024
- BNI telah berkomitmen untuk dapat merealisasikan pembentukan ekosistem pembiayaan berbasis kawasan paling tidak di 1 lokasi pada tahun 2025.
- Ditjen PDSPKP akan memberikan data UMKM dan Lokasi kawasan potensial untuk dijadikan percontohan dalam pembentukan ekosistem pembiayaan.
- Akan dilaksanakan kordinasi intensif antara Dit. Pemberdayaan Usaha dan PT. BNI 46 terkait rencana pembentukan ekosistem pembiayaan

4) Kegiatan Fasilitasi Akses Pembiayaan di Kabupaten Garut

Dalam rangka penguatan UMKM sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan pembiayaan kredit program untuk mendukung program prioritas KKP berbasis kawasan produksi sektor kelautan dan perikanan dan mendukung program UMKM naik kelas telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi akses pembiayaan usaha di Kabupaten Garut. Kegiatan dilaksanakan pada hari kamis tanggal 13 februari 2025 secara daring melalui aplikasi Zoom dengan hasil sebagai Berikut :

- Kegiatan Fasilitasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan di Kabupaten garut dibuka oleh Direktur Pemberdayaan Usaha, Ditjen PDSPKP dan dihadiri oleh Perwakilan Setditjen PDSPKP, Dit Logistik ditjen PDSPKP, Dit Pemasaran, Dit Pengolahan ditjen PDSPKP, Pusat Penyuluhan BPSDMKP, PT Bank Mandiri dan 34 pelaku usaha kelautan dan perikanan Kabupaten Garut.

- Bank Mandiri telah berkomitmen untuk dapat dapat memfasilitasi pelaku usaha perikanan di Kabupaten Garut untuk mendapatkan akses pembiayaan dan pembinaan dalam literasi keuangan.
- Ditjen PDSPKP akan memberikan data UMKM dan Lokasi kawasan potensial untuk dijadikan percontohan dalam pembentukan ekosistem pembiayaan.
- Akan dilaksanakan kordinasi intensif antara Dit. Pemberdayaan Usaha, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dan PT. Bank Mandiri dalam fasilitasi akses pembiayaan dan literasi keuangan.

5) **Rapat Koordinasi Fasilitasi Pembiayaan dengan PT. BNI 46, tanggal 14 Maret 2025**

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka monitoring tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan akses pembiayaan sektor usaha kelautan dan perikanan periode triwulan I dengan hasil sebagai berikut:

- Dari 30 UMKM penerima bantuan gudang beku yang telah disampaikan, terdapat 21 koperasi KP yang datanya lengkap, dan hanya 2 koperasi yang telah mejadi nasabah BNI. Koperasi yang potensial untuk mendapatkan program pembiayaan dengan skema *offtaker* yaitu Koperasi Mina Muara Sejahtera di Banten, dan kondisinya belum bisa diusulkan menjadi *offtaker* karena hubungan koperasi dan anggota masih kurang aktif dan dominan (terlihat dari nilai pembelian koperasi ke anggota hanya berkisar 25%, sehingga diasumsikan koperasi melakukan pembelian selebihnya dari non anggota). Namun demikian, BNI akan mendalami kembali kepada koperasi dimaksud perihal informasi tentang transaksi dengan anggota koperasi tersebut. Kelebihan dari skema *offtaker* yaitu Koperasi dapat merekomendasikan anggotanya untuk memperoleh kredit program dari BNI. Dalam rangka menindaklanjuti Naskah Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Bank Mandiri Nomor 16/MEN-KP/NK/X/2024 dan Nomor DIR.MOU/23.A/2024 tentang Pemanfaatan Jasa dan Layanan Perbankan pada tanggal 21 Oktober 2024, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah melakukan pertemuan dengan Bank Mandiri pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2025, dengan hasil sebagai berikut:
- Dari data 47 UMKM KP Naik Kelas yang telah mengisi link pendataan, terdapat 3 UMKM yang telah menjadi nasabah BNI dan 44 non BNI. Dari 47 UMKM tersebut

akan dikurasi oleh BNI dan apabila lolos berpotensi untuk diikutsertakan dalam BNI Expo 2025 (rencana pelaksanaan Agustus 2025). Informasi terkait hasil kurasi atas 47 UMKM akan disampaikan ke PDS sebelum event pada bulan Juli. Saat ini BNI masih menyusun pedoman kurasi dan ketentuan jumlah UMKM yang bisa diikutsertakan pada acara tersebut.

- Melalui Fasilitasi akses pembiayaan berbasis kawasan ini semua stakeholders utama pelaku usaha kelautan dan perikanan baik koperasi, kelompok maupun usaha perorangan sangat berpeluang untuk mendapatkan manfaat berupa akses pembiayaan, pelatihan dan pendampingan dari BNI 46.

6) **Kegiatan Webinar Cerdas Kelola Keuangan bagi UMKM Kelautan dan Perikanan**

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan UMKM Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melaksanakan Webinar Cerdas Kelola Keuangan bagi UMKM Kelautan dan Perikanan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 dengan hasil antara lain :

- Webinar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang secara rutin telah dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP. Webinar dibuka oleh Dirjen PDSPKP dan diikuti oleh sekitar 1748 peserta yang terdiri dari UMKM KP, penyuluh dan perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan seluruh Indonesia.
- Peserta UMKM KP banyak yang berminat mengikuti program BNI Expo dan BNI Go Global. BNI memberikan kesempatan kepada UMKM KP yang berminat mengikuti program BNI Expo dan BNI Go Global sepanjang lolos kurasi.

Dalam mendukung capaian Indikator Kinerja tersebut diatas, Tim Kerja Pembiayaan pada tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 654.000.000,- dengan anggaran terblokir dan efisiensi sebesar Rp. 546.552.000,- sehingga anggaran efektif yang dikelola oleh Tim Kerja Pembiayaan sebesar Rp. 107.448.000,-

3.2.3 Sasaran Strategis 3

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan

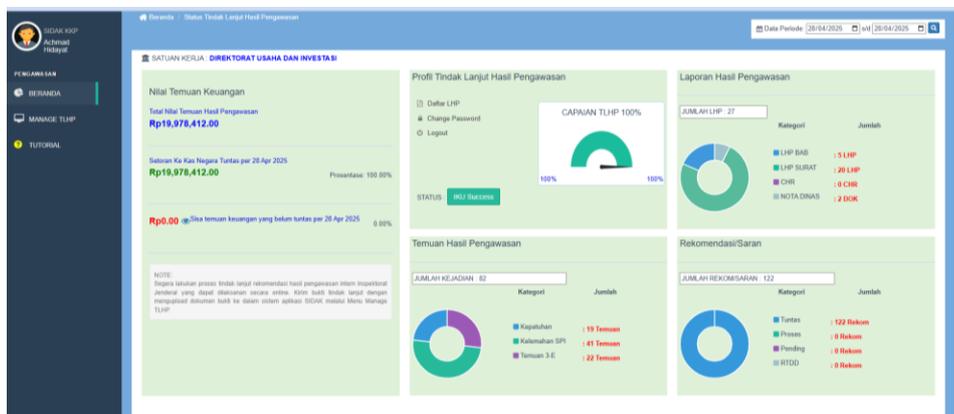
IK6. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit dan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha sampai dengan waktu pengukuran.

Berdasarkan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan Itjen KKP melalui Aplikasi SIDAK pada Triwulan I 2025, Nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Pemberdayaan Usaha sebesar 100% atau setara dengan 105,26% dari target triwulan I. Nilai tersebut diperoleh dari penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan oleh Inspektorat Jenderal tahun 2024 yang telah diselesaikan secara Tuntas dan telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha.

Tabel 8 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2024
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025	TW I 2024	TW IV 2023	TW I 2023	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha (%)	95	80	80	95	100	100	100	100	105,26	125	125	105,26



Gambar 3. 18 Tangkap Layar Aplikasi SIDAK pada 31 Maret 2025

IK7. Persentase penyelesaian temuan BPK di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Ditjen PDSPKP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 ditargetkan 100. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025

IK8. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Tabel 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	-	75	-	75	-	82,33	-	-	-	109,77	-	-

Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2025 ditargetkan sebesar 75. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada periode

ini nilai capaian kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

Dalam rangka pencapaian target dimaksud, Direktorat Pemberdayaan Usaha telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam upaya pemenuhan indikator kinerja Nilai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yaitu dengan melibatkan seluruh pegawai Direktorat Pemberdayaan Usaha untuk menindaklanjuti hasil revidi Inspektorat Jenderal pada periode sebelumnya, melalui rapat koordinasi intensif pada masing-masing area dengan dukungan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, serta melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan untuk penilaian WBK.

IK9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai AKIP merupakan penilaian terhadap penerapan AKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Bentuk kegiatan pendukung pada IKU ini adalah evaluasi pengukuran kinerja dan revidi laporan kinerja bersama APIP yang pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum dapat dihitung nilai capaiannya pada triwulan berjalan.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon II diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi pada aplikasi Kinerjaku KKP yang mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 ditargetkan 86. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga pada

periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

IK10. Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018). Nilai indeks profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN yang diukur setiap tahun oleh Bagian SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Ditjen PDSPKP. Kegiatan pendukung untuk IKU ini adalah dalam bentuk pengembangan SDMA serta kegiatan monitoring dan evaluasi pada SDMA.

Tabel 10 Ikhtisar Pencapaian Indikator Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	s.d TW I 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	-	83,2	-	87	-	92,11	-	-	-	110,71	-	-

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha) tahun 2025 ditargetkan sebesar 87. Indikator kinerja ini bersifat semesteran sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Usaha belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada semester I dan semester II tahun 2025.

IK11. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di

Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 11 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Persentase Realisasi terhadap Target			Persentase Realisasi s.d TW I terhadap target 2025 Tahun 2025
	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	Tahun 2025	TW I 2025	TW IV 2024	TW I 2024	
Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha	-	1	-	1	-	2	-	-	-	200	-	-

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik lingkup Direktorat Pemberdayaan Usaha tahun 2025 ditargetkan sebanyak 1 inovasi. Indikator kinerja ini bersifat tahunan

sehingga pada periode ini nilai capaian kinerja belum dapat dihitung. Perhitungan baru akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2025.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Dalam melaksanakan arah kebijakan pembangunan nasional 2025-2029 yakni Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru serta Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Direktorat Pemberdayaan Usaha selama periode triwulan I tahun 2025 telah melaksanakan berbagai program seperti upaya pemberdayaan kelompok usaha masyarakat, fasilitasi akses permodalan, pemetaan dan promosi investasi, pengembangan kewirausahaan dan pengembangan kelembagaan usaha kelautan dan perikanan dimana merupakan bagian dari kontribusi nyata dalam menjawab tantangan ketimpangan ekonomi dan keterbatasan akses pelaku usaha kecil terhadap sumber daya produksi serta mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

Meskipun berbagai pencapaian positif telah diraih, kami menyadari masih terdapat berbagai tantangan dan kendala, baik dari aspek regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, maupun dinamika ekonomi global yang memengaruhi sektor kelautan dan perikanan nasional. Oleh karena itu, hasil evaluasi dari laporan ini akan menjadi landasan penting dalam perbaikan kebijakan dan strategi ke depan, guna memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia.

4.2. Rekomendasi

Secara umum, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk pencapaian Indikator Kinerja sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Rekomendasi tindak lanjut yang perlu dilakukan pada periode mendatang antara lain:

1. Sosialisasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota serta DPMPTSP terkait perizinan berusaha;
2. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha
3. Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan dalam upaya peningkatan nilai pembiayaan sektor kelautan dan perikanan.

4.3. Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang telah dilaksanakan atas rekomendasi pada triwulan IV 2024, sebagai berikut:

No	Rekomendasi Triwulan IV 2024	Tindak Lanjut Pada Triwulan I 2025
1	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait upaya pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga usaha kelautan dan perikanan	Telah dilaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan pada tanggal 6 dan 13 Maret 2025 baik secara offline maupun online
2	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan	Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha KP dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2025 dan 17 Maret 2025. Melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kota Jakarta Utara dan UMKM pengolah hasil
3	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam upaya peningkatan pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan	Dalam rangka penguatan UMKM sektor kelautan dan perikanan melalui peningkatan pembiayaan kredit program serta mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Nelayan Modern (Kalamo) dan Kampung Perikanan Budidaya

		(KPB), telah diselenggarakan rapat koordinasi fasilitasi akses pembiayaan Kredit Program berbasis kawasan yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 16 Januari 2025
4	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan	Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Lembaga keuangan dan dinas kelautan dan perikanan daerah dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan bimtek akses pembiayaan

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAM www.kkp.go.id SURELPersuratan.pds@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Catur Sarwanto**
Jabatan : Direktur Pemberdayaan Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Budi Sulistiyo**
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan

Budi Sulistiyo

Pihak Kesatu,
Direktur Pemberdayaan Usaha

Catur Sarwanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Investasi Kelautan dan Perikanan	1.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	7,24
		2.	Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang Diterbitkan (Sertifikat)	50
2.	Meningkatnya Omset UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	3.	Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya (Persen)	5
		4.	Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (Persen)	6
		5.	Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program (Rp. Triliun)	7,99
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	6.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	95
		7.	Persentase Penyelesaian temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Persen)	100
		8.	Nilai Minimal yang Dipersyaratkan untuk pemeliharaan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	75
		9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Nilai)	86
		10.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha (Indeks)	87
		11.	Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan pada Unit Kerja Direktorat Pemberdayaan Usaha (Inovasi)	1

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
<i>PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</i>	
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	12.619.000.000
Total Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha Tahun 2025	12.619.000.000

Jakarta, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing
Produk Kelautan dan Perikanan



Budi Sulistiyono

Pihak Kesatu,
Direktur Pemberdayaan Usaha



Catur Sarwanto

Lampiran 2.

Memorandum penyampaian capaian dan data dukung laporan kinerja Direktorat Pemberdayaan Usaha Triwulan I

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL Penguatan Daya Saing Produk
KELAUTAN DAN PERIKANAN

MEMORANDUM
Nomor 247/DJPDPSPKP.3/TU.140/IV/2025

Yth. : Direktur Jenderal PDPSPK
Dan : Direktur Pemberdayaan Usaha
Hal : Penyampaian Realisasi Capaian IKU Level II dan Realisasi Anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha Periode Triwulan I Tahun 2025
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 16 April 2025

Dalam rangka pemenuhan pelaporan kinerja Ditjen PDPSPKP Triwulan I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan anggaran yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pemberdayaan Usaha yang telah dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)

Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan merupakan nilai total realisasi penanaman modal usaha sektor kelautan dan perikanan (Usaha penangkapan ikan, Usaha perikanan budidaya, Usaha pengolahan ikan, Usaha garam, Usaha pemasaran/perdagangan, Jasa perikanan) baik yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2025.

Realisasi Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan pada triwulan I tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp. 1,75 Triliun yang terdiri dari PMA sebesar Rp384,98 Miliar dan PMDN sebesar Rp1,36 Triliun. Capaian tersebut setara dengan 104,70% dari target triwulan I sebesar Rp1,67 Triliun dan setara dengan 24,17% dari target tahun 2025 sebesar Rp7,24 Triliun.

2. Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang Diterbitkan (Sertifikat)

Jumlah Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran yang diterbitkan merupakan jumlah dokumen perizinan berusaha sub sektor pengolahan dan pemasaran baik itu permohonan baru, perpanjangan, maupun perluasan yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha.

dan dampak terhadap anggota koperasi dan masyarakat. Target peningkatan kinerja lembaga usaha sektor kelautan dan perikanan sebesar 6% dan akan dilaporkan di akhir tahun, sehingga pada triwulan I nilai Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan belum dapat dihitung capaian realisasinya.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Indikator kinerja tersebut telah dilakukan pendataan awal terhadap lembaga usaha yang telah dibina tahun sebelumnya, melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan lembaga usaha, fasilitasi inisiasi pembentukan lembaga usaha, dan fasilitasi perluasan pasar untuk pengembangan lembaga usaha.

5. Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan Melalui Kredit Program (Rp. Triliun)

Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program merupakan Jumlah nilai realisasi pembiayaan usaha KP yang bersumber dari penyaluran kredit program, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ultra Mikro (UM) kepada pelaku usaha KP yang disalurkan oleh lembaga keuangan Bank maupun Non Bank.

Realisasi Nilai Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada Triwulan I sebesar Rp. 1,69 Triliun kepada 71.865 Debitur yang terdiri atas Rp. 1,34 Triliun kepada 27.375 Debitur bersumber dari KUR usaha KP dan Rp. 0,25 Triliun kepada 44.490 Debitur bersumber dari Kredit UMI.

Capaian nilai pembiayaan sebesar Rp. 1,59 Triliun jika dibandingkan dengan target Triwulan I sebesar Rp. 1,2 Triliun maka tercapai sebesar 132% atau setara dengan 19,90% dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar Rp. 7,99 Triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 maka capaian nilai pembiayaan pada Triwulan I tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 15,02%.

6. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pemberdayaan Usaha merupakan Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Ijen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Direktorat

Jumlah realisasi Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Sub Sektor Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang telah Diterbitkan pada triwulan I tahun 2025 sebanyak 17 sertifikat yang terdiri dari 8 (Delapan) Sertifikat Standar untuk usaha pengolahan ikan dan 9 (Sembilan) Sertifikat Standar untuk usaha pemasaran ikan. Jika dibandingkan dengan target triwulan I sebanyak 10 sertifikat maka realisasi jumlah perizinan berusaha tercapai sebesar 170% dan jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebanyak 50 maka realisasi pada triwulan I mencapai 34%.

3. Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya (Persen)

Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya merupakan persentase jumlah UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang meningkatkan omsetnya pasca pembinaan dan pendampingan menuju UMKM Naik Kelas dibandingkan dengan Jumlah UMKM yang dibina. Indikator Kinerja ini dilaporkan secara tahunan, sehingga pada triwulan I nilai Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang Meningkatkan Omsetnya belum dapat dihitung capaian realisasinya.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung Indikator kinerja tersebut adalah kegiatan pembinaan dan pendampingan wirausaha kelautan dan perikanan yang dilakukan secara luring di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara dengan melibatkan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kota Jakarta Utara dan secara daring dengan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan di beberapa daerah.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk mengetahui proses bisnis UMKM pengolahan produk kelautan dan perikanan sehingga dapat ditentukan aspek yang akan dibina untuk meningkatkan omsetnya.

4. Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (Persen)

Persentase Peningkatan Kinerja Lembaga Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan merupakan tingkat perbandingan kemampuan lembaga usaha sektor KP antara sebelum dan setelah dilakukan penguatan lembaga mengacu pada 3 parameter yaitu operasionalisasi kelembagaan, kinerja kelembagaan

Pemberdayaan Usaha sampai dengan waktu pengukuran.

Nilai realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Pemberdayaan Usaha pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 100% atau setara dengan 105,26% dari target triwulan I. Nilai tersebut diperoleh dari penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan oleh Inspektoral Jenderal tahun 2024 yang telah diselesaikan secara Tuntas.

7. Realisasi Pengelolaan Anggaran

Dalam mendukung capaian Indikator Kinerja tersebut diatas, Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp. 12.619.000.000,- dengan anggaran terblokir dan efisiensi sebesar Rp. 10.796.253.000,- sehingga anggaran efektif yang dikelola oleh Direktorat Pemberdayaan Usaha sebesar Rp. 1.822.747.000,-

Jumlah realisasi anggaran Direktorat Pemberdayaan Usaha pada periode Triwulan I sebesar Rp. 81.018.286,- atau setara dengan 4,44% dari Pagu Efektif sebesar Rp. 1.822.747.000,-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut kami mengucapkan terima kasih.

 Ditandatangani
Secara Elektronik
Catur Sarwanto

Tembusan
Sekretaris Direktorat Jenderal PDPSPK

